



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh target kinerja di bidang perencanaan dan penelitian.

LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun sebagai bahan evaluasi atas rangkaian Program yang telah direncanakan di awal tahun anggaran 2023 dan sebagai bahan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen LKjIP Bappeda Tahun 2023. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, khususnya bagi aparatur Bappeda Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh rencana kinerja Bappeda di tahun 2023.

Banda Aceh, 23 Januari 2024
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


FAISAL M, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD;
2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD; dan
3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Adapun sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2023 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Isu strategis;
 4. Gambaran Umum Organisasi; dan
 5. Dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
 1. Uraian singkat tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh periode 2023-2026 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
 2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
 3. Penetapan Kinerja; dan
 4. Penganggaran Kegiatan.

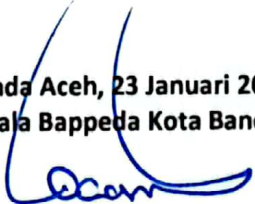
- c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. Capaian Kinerja Organisasi;
 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
 3. Akuntabilitas Keuangan; dan
 4. Keberhasilan dan Hambatan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2023 mencapai **70,00 persen** yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 berada pada kriteria **sedang**.

Tahun Anggaran 2023, realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 8.553.383.726,- atau 82,02 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda sementara anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.874.544.934,- atau 17,98 persen. Hal ini disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2023 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 dapat terwujud.

Banda Aceh, 23 Januari 2024
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


FAISAL M, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh ;
2. Mendorong Bappeda Kota Banda Aceh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2023, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan pada tahun 2023 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2023-2026 melalui realisasasi pelaksanaan Renja tahun 2023, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2026, yaitu **terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.**

1.3. Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen nasional dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan
4. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi; Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

1.4.2 Sumber Daya Manusia di Bappeda Kota Banda Aceh

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2023 sebanyak 64 orang, PNS sebanyak 43 orang, dan Non PNS sebanyak 17 orang, serta tenaga ahli 4 (empat) orang. Klasifikasi Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. dan tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag/Perencana Ahli Muda	3
6	Kasubbid/Perencana Ahli Muda	9
7	Kepala TU UPTB	1
Jumlah		20

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2023

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023

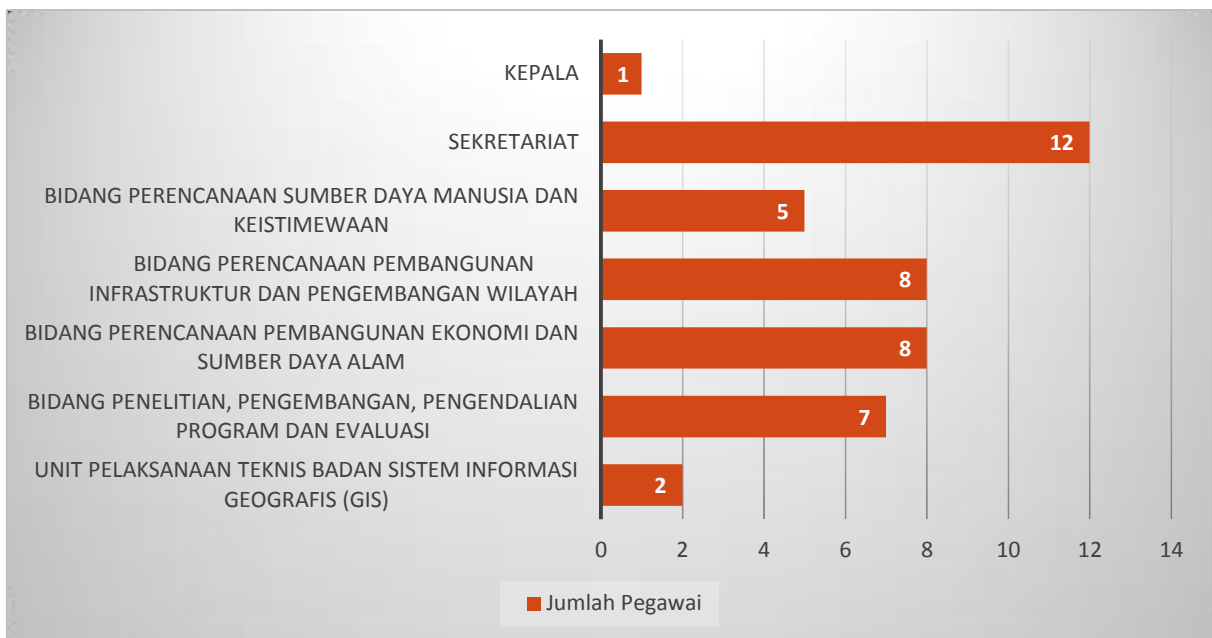
No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	11
3	S1	25
4	Diploma/Sederajat	4
5	SMA/Sederajat	2
Jumlah		43

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas diketahui bahwa Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 25 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 11 orang, dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun sebaran jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh menurut bidang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Bidang Tahun 2022



Sumber: Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2023

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Buku Inventaris

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga
1	Tanah	1 parsial	6.336.087.000
2	Gedung dan Bangunan	4 unit	3.546.148.000
3	Peralatan dan Mesin	712 unit	3.724.476.247
4	Instalasi	2 unit	123.601.000
Jumlah			13.730.312.247

Sumber: Buku Inventaris, 2022

1.5 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Bappeda Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja utama daerah sekaligus merupakan penjabar yang menggambarkan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 adalah meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.

2.1.2 Sasaran

Sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah kemudian diuraikan dalam pohon kinerja sasaran sehingga seluruh rencana program dan kegiatan Bappeda yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat tergambar secara sistematis.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Awal (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: (1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran: (1.1) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.2 Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.3 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan RPD : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 Sasaran RPD : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
 IKU RPD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Tujuan OPD : Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif
 Sasaran OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif

Tabel 2.2
Pohon Kinerja Sasaran

INDIKATOR SASARAN	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD								
PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD									
PROGRAM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
SUB KEGIATAN	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
INDIKATOR SASARAN	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan									
PROGRAM	Penelitian dan Pengembangan Daerah									
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
SUB KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

Sumber: Renstra Bappeda 2023-2026

2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023

Program kerja tahun 2023 menjadi starting point dari pelaksanaan program kerja jangka menengah sesuai rencana strategis BAPPEDA periode 2023-2026. Meskipun rata-rata jenis program dan kegiatan BAPPEDA adalah sama disetiap tahunnya, namun terdapat beberapa perbedaan seperti nilai target kinerja serta jenis penelitian yang dilaksanakan. Kegiatan yang menjadi core business BAPPEDA seperti pelaksanaan proses musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, serta kegiatan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD diperkirakan sama disetiap tahunnya. Namun demikian keberadaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan daerah disetiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan tugas pada dua bidang urusan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya, program kerja BAPPEDA dipisahkan ke dalam dua kelompok urusan tersebut. Secara keseluruhan, ditahun 2023 terdapat 4 program.

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh di Tahun 2023, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini merupakan program yang mendukung kelancaran operasional BAPPEDA. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di BAPPEDA Kota Banda Aceh di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya. Tanpa program penunjang, roda organisasi dapat terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - b. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Konsultasi Publik, Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah detail kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2023.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - 1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
 - 4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat, khususnya

terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - 1.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2023:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
 - 1.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Parawisata.

2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - 2.4 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - 2.5 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - 2.6 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - 3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai	3 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	1 Laporan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit
		1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	1 Dokumen
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	20 Berita Acara
		2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota	1 Berita Acara
		2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Masukan
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
		2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintaha Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 Persen
		2.4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang di kelola	3 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	5	
	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	
		3.1.2 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan	15 Perangkat Daerah	
		3.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.2.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	18 Perangkat Daerah
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja pada bidang infrastruktur	11 Perangkat Daerah
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	6 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan SInergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	5 Laporan
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen
		4.1.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan pariwisata	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	4 Dokumen
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	1 Dokumen
		4.2.3 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	4 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1 Dokumen
		4.2.5 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen
		4.2.6 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	1 Dokumen
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil pengembangan inovasi dan teknologi	100 Persen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	5 Dokumen
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2 Laporan

Sumber: RKT Bappeda Banda Aceh Tahun 2023

2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab atau kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tahun 2023 alokasi belanja langsung Bappeda Banda Aceh sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh sebesar Rp. **12.873.345.789,-** dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1 Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD	100 %
		1.2 Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100 %
		1.3 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100 %

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran per Program Tahun 2023

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.877.530.609	
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.366.155.825	Mendukung Indikator Kinerja Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	776.988.620	Mendukung Indikator Kinerja Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	852.670.735	Mendukung Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana Kelitbangan
	JUMLAH	12.873.345.789	

2.4 Penganggaran Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.3
Penganggaran Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	8.877.530.609	7.954.650.459
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	76.773.460	49.841.000
			1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	76.773.460	49.841.000
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	7.065.593.513	6.419.424.788
			1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	6.072.893.513	5.481.024.788
			1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	992.700.000	938.400.000
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.400.000	12.000.000
			1.3.1 Sub kegiatan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.400.000	0
			1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	12.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	1.006.167.260	622.884.671
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6.919.000.	6.919.000
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	573.227.340	179.002.500
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	26.020.920	26.020.920
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	400.000.000	410.942.251
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.098.000	463.632.000
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	330.620.000	330.620.000
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.478.000	133.012.000
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.498.376	386.868.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
			1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.857.376	149.318.000	
			1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41.241.000	37.550.000	
			1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2.400.000	200.000.000	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	2.366.155.825	1.462.962.872	
			2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	1.375.732.220	1.135.453.780
				2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	142.486.750	0
				2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	71.479.930	38.615.000
				2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	107.244.240	21.704.240

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
			2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	237.952.465	126.514.465
			2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	816.568.835	948.620.075
		2.2		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	120.990.845	64.544.750
			2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	120.990.845	64.544.750
		2.3		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	624.858.070	215.977.842
			2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	457.044.260	169.502.260
			2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	167.813.810	46.754.582
		2.4		Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	244.574.690	46.986.500

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)		
			2.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam system informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	244.574.690	46.986.500	
	Persentase Renja OPD selaras dengan RKPD	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	776.988.620	226.712.250	
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	272.514.700	72.980.000	
			3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi rentra/renja dengan RKPD/ RPJMD pada bidang pemerintahan	58.069.850	0
			3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	126.320.000	72.980.000
			3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	88.124.850	0
			3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	290.024.585	104.987.250

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
			3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	117.547.480	101.687.250
			3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	101.317.350	1.800.000
			3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	71.159.755	1.500.000
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	214.449.335	48.745.000
			3.3.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	92.387.745	48.745.000
			3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	66.200.660	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	55.860.930	0
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	852.670.735	783.603.115
		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	361.489.410	387.218.895
			4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	161.372.370	189.851.855
			4.1.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	200.117.040	197.367.040
		4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan		Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	412.656.680	396.384.220
			4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	200.117.180	197.367.180

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	5.924.815	0
			4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	200.117.040	199.017.040
			4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	2.749.965	0
			4.2.5	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	2.421.325	0
			4.2.6	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1.326.355	0
		4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	78.524.645	0
			4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2.500.425	0
			4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	76.024.220	0

Sumber: DPPA Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, organisasi seperti yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian indikator kinerja, sehingga terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023 (%)	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)
1	2		3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RRPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100
	2	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RRPD	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100
	3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	10	10
Rata-Rata Persentase Realisasi						70.00

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2023 mencapai **70 persen**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 berada pada kriteria **Sedang**.

Bappeda tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja Bappeda kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2023-2026, diukur dari tiga (3) indikator.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022-2023 dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022 dengan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (2022)		INDIKATOR SASARAN (2023)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)
1	2		3	4	5
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100	100
	2	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100	100
	3	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		58.82	-
	4		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	-	10

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2023 hanya 2 (dua) indikator yang bisa disandingkan dengan tahun 2022 yaitu indikator (1) Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD dan indikator (2) Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD, hal ini disebabkan karena indikator yang digunakan Tahun 2023 telah berbeda sesuai dengan periode Renstra Bappeda Tahun 2023-2026.

Dilihat dari pencapaian indikator Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD sebesar 100 persen, dan Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD sebesar 100 persen menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil. Berhasilnya Bappeda dalam menjalankan khususnya fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsistensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/RKT) tahun 2023 telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda

2023-2026 dan sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Adapun capaian terhadap indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan hanya mencapai 10 persen disebabkan oleh rasionalisasi belanja daerah sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2023 pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	7.954.650.459	7.408.911.705	93,14
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	100%	100%	49.841.000	48.941.000	98,19
		1.1.	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	49.841.000	48.941.000	98,19
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	6.419.424.788	6.306.444.846	98,24
		1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	100%	5.481.024.788	5.449.881.871	99,43
		1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	938.400.000	856.562.975	92,28
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	100

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	0	0	-
			Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	12.000.000	12.000.000	100
		1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	58,58%	622.884.671	364.872.965	58,58
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	6.919.000	3.360.000	48,56
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	-	179.002.500	0	-
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	26.020.920	21.638.920	83,16
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	410.942.251	33.874.045	82,71%
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	463.632.000	350.434.494	75,58%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	330.620.000	232.543.494	70,34%
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	133.012.000	117.891.000	88,63%
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	386.868.000	326.218.400	84,32%
		1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	100%	149.318.000	103.298.400	69,18%
		1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit	114 Unit	100%	37.550.000	23.720.000	63,17%
		1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	200.000.000	199.200.000	99,60%
		2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	1.462.962.872	977.159.407	66,79%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kegiatan Pembangunan Daerah yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	1.135.453.780	872.680.440	76,86%
		2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Telaahan	-	0	0	0	0
		2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	38.615.000	37.809.000	97,91%
		2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20 Berita Acara	20 Berita Acara	100%	21.704.240	13.090.000	60,31%
		2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	126.514.465	124.130.000	98,12%
		2.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	948.620.075	697.651.440	73,54%
		2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	64.544.750	37.010.000	57,34%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan	2 Masukan	100%	64.544.750	37.010.000	57,34%
		2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	26,75%	215.977.842	57.773.967	26,75%
		2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Dokumen	100%	169.502.260	37.171.885	21,93%
		2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	46.475.582	20.602.082	44,33%
		2.4	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	20,63%	46.986.500	9.695.000	20,63%
		2.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	46.986.500	9.695.000	20,63%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	226.712.250	138.090.000	60,91%	
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	72.980.000	44.785.000	61,37%
		3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	-	-	0	0	-
		3.1.2	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	100%	72.980.000	44.785.000	61,37%
		3.1.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	-	-	0	0	-
		3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	104.987.250	45.835.000	43,66%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		3.2.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	101.687.250	45.685.000	44,93%
		3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000	150.000	8,33%
		3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	-	1.500.000	0	-
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	48.745.000	47.470.000	97,38%
		3.3.1	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	48.745.000	47.470.000	97,38%
		3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	-	0	0	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan	-	-	0	0	-
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	20%	10%	783.603.115	29.222.650	3,73%
		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	7,55%	387.218.895	29.222.650	7,55%
		4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	7,55%	189.851.855	29.222.650	7,55%
		4.1.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	-	-	197.367.040	0	-
		4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	100%	-	-	396.384.220	0	-
		4.2.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Dokumen	-	-	197.367.180	0	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		4.2.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	-	0	0	-
		4.2.3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	199.017.040	0	-
		4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Hasil Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	-	0	0	-
		4.2.5	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	-	0	0	-
		4.2.6	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	-	0	0	-
		4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	-	0	0	-
		4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	-	0	0	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Dokumen	-	-	0	0	-

Berdasarkan Tabel di atas Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

1. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD.

Indikator ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen hal ini disebabkan adanya konsistensi program RKPD dengan RPD tahun 2023.

2. Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD

Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen, karena bidang-bidang koordinasi di Bappeda telah melakukan asistensi juga pendampingan untuk penyusunan dokumen Renja OPD sehingga selaras dengan dokumen RKPD.

3. Persentase Implementasi rencana Kelitbangan

Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 10 persen, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 adanya rasionalisasi anggaran belanja daerah sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp. 12.873.345.789,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 12.300.118.449,- dan belanja Modal sebesar Rp. 573.227.340,-. Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA. 2023 untuk dialihkan penyelesaian pembayaran belanja utang kegiatan Tahun 2022 dan penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Pergeseran revisi pertama ditetapkan sebesar Rp. 11.086.299.054,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.907.296.554,-

dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500,- Pada Revisi Kedua Anggaran belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 10.539.549.051,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.360.546.551,- dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500,- Sedangkan Pada Perubahan Anggaran alokasi belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 10.427.928.696,- Belanja operasi ditetapkan sebesar Rp. 10.248.926.196,- dan belanja modal sebesar Rp. 179.002.500,-

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda per 31 desember 2023 cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 8.553.383.762,- atau 82,02 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.874.544.934,- atau 17,98 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua) urusan, 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 42 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 13 Sub kegiatan.

2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Peneliitian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel. 3.5
Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5,01	BAPPEDA	10.427.928.696	8.553.383.762	82,02	1.874.544.934	17,98
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.954.650.459	7.408.911.705	93,14	545.738.754	6,86
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.841.000	48.941.000	98,19	900.000	1,81
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.841.000	48.941.000	98,19	900.000	1,81
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.419.424.788	6.306.444.846	98,24	112.979.942	1,76
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.481.024.788	5.449.881.871	99,43	31.142.917	0,57
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	938.400.000	856.562.975	91,28	81.837.025	8,27
5.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.884.671	364.872.965	58,58	258.011.706	41,42

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.919.000	3.360.000	48,56	3.559.000	51,44
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.002.500	0,00	0,00	179.002.500	0,00
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.020.920	21.638.920	83,16	4.382.000	16,84
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.942.251	339.874.045	82,71	71.068.206	17,29
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.632.000	350.434.494	75,58	113.197.506	24,42
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.620.000	232.543.494	70,34	98.076.506	29,66
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.012.000	117.891.000	88,63	15.121.000	11,37
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.868.000	326.218.400	84,32	60.649.600	15,68
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.318.000	103.298.400	69,18	46.019.600	30,82
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.550.000	23.720.000	63,17	13.830.000	36,83
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.200.000	99,60	800.000	0,40
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.462.962.872	977.159.407	66,79	485.803.465	33,21
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.135.453.780	872.680.440	76,86	262.773.340	23,14
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	38.615.000	37.809.000	97,91	806.000	2,09
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21.704.240	13.090.000	60,31	8.614.240	39,69
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	126.514.465	124.130.000	98,12	2.384.465	1,88
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	948.620.075	697.651.440	73,54	250.968.635	26,46
5.01.02.2.02	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.544.750	37.010.000	57,34	27.534.750	42,36

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	64.544.750	37.010.000	57,34	27.534.750	42,36
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	215.977.842	57.773.967	26,75	158.203.875	73,25
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	169.502.260	37.171.885	21,93	132.330.375	78,07
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	46.475.582	20.602.082	44,33	25.873.500	55,67
5.01.02.2.04	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	46.986.500	9.695.000	20,63	37.291.500	79,37
5.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	46.986.500	9.695.000	20,63	37.291.500	79,37
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	226.712.250	138.090.000	60,91	88.622.250	39,09
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72.980.000	44.785.000	61,37	28.195.000,00	38,63
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72.980.000	44.785.000	61,37	28.195.000,00	38,63
5.01.03.2.02	Kegiatan :Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	104.987.250	45.835.000	43,66	59.152.250	56,34
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	104.987.250	45.685.000,00	44,93	56.002.250,00	55,07
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.800.000	150.000	8,33	1.650.000	91,67
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	48.745.000	47.470.000	97,38	1.275.000	2,62
5.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	48.745.000	47.470.000	97,38	1.275.000	2,62
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	783.603.115	29.222.650	3,73	754.380.465	96,27

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2023	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.05.02.2.02	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	387.218.895	29.222.650	7,55	357.996.245	92,45
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	189.851.855	29.222.650	7,55	357.996.245	92,45
5.05.02.2.02.05	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	197.367.040	0,00	0,00	197.367.040	100
5.05.02.2.03	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	396.384.220	0,00	0,00	396.384.220	100
5.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	197.367.180	0,00	0,00	197.367.180	100
5.05.02.2.03.07	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	199.017.040	0,00	0,00	199.017.040	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat, dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.7.954.650.450,- dapat direalisasikan sebesar Rp.7.408.911.705 atau 93,14 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 6,86 persen. Sedangkan pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.462.962.872,- dapat direalisasikan sebesar Rp.977.159.407,- atau 66,79 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.138.090.000,- atau 60,91 persen. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah hanya terealisasi sebesar 3,73 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2023 sebesar 82,02 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran 2022, hal ini disebabkan dibatasinya surat penyediaan dana (SPD) kegiatan karena fokus untuk menyelesaikan hutang Tahun anggaran 2022.

Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 88,96 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan

Tabel. 3.6
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2019 s/d 2023

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI %				
	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	92,72	97,66	84,33	88,06	82,02
BELANJA PEGAWAI	96,08	103,51	102,53	96,97	99,06
BELANJA BARANG DAN JASA	88,63	88,39	68,84	79,94	64,95
BELANJA MODAL	99,79	91,40	100,00	100,00	0,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2023 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2022.

3.4 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Ada beberapa faktor penting yang menjadi pemicu keberhasilan Bappeda sebagai organisasi dalam mencapai target-target kinerja ditahun 2023 antara lain:

- a. Komitmen dan semangat dari ASN di lingkungan Bappeda terkait pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai di lingkungan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.
- c. Adanya hubungan yang cukup baik antara Bappeda dengan pihak lain khususnya perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsi koordinasi.
- d. Adanya pemanfaatan teknologi informasi mulai dari system informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Adapun faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2023 antara lain:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta *stakeholders* terkait
3. Minimnya pelatihan perencanaan pembangunan
4. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan
6. Minimnya penelitian perencanaan pembangunan

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPP.
2. Mengoptimalkan koordinasi antar OPD serta stakeholders terkait.
3. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi kepada produsen data perencanaan agar dapat menghasilkan data yang valid, up to date, dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan penelitian perencanaan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LKjIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LKjIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2023 mencapai 70,00 persen, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023 berada pada kriteria **sedang**. Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 dapat terwujud.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>